



## Strategi Alevi Sebagai Kelompok Kepentingan Pasca Penolakan Masyarakat Turki

Shifa Melinda Naf'an<sup>1\*</sup>, Gonda Yumitro<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

\*Korespondensi: [nafanshifa@gmail.com](mailto:nafanshifa@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 10 Juli  
2022

Disetujui 30  
Agustus 2022

Dipublikasikan 31  
Agustus 2022

Keywords:  
AABF; Alevi;  
Alevism; AKP; Alevi  
Opening; Turkiye

© 2022 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

*Penolakan Alevi di Turki tidak lepas dari bentuk framing ottoman pada masa lalu. Masyarakat turki masih menilai ketidaksucian Alevi dan ritual yang dianggap sesat. Dalam artikel ini penulis berusaha mengkaji strategi yang dilakukan oleh Alevi selaku kelompok kepentingan pasca penolakan masyarakat di Turki dalam mendapatkan rekognisi. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penjabaran data yang telah dikumpulkan dan kemudian disusun berdasarkan sistematika pembahasan. Penelitian ini menggunakan konsep kelompok kepentingan beserta parameter keberhasilan tindakan kolektif. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa Alevi melakukan dua strategi, yaitu eksternal dan internal dalam menghadapi penolakan masyarakat Turki. Strategi internal dilakukan melalui DRSA, Alevi opening yang diprakarsai oleh partai AKP, dan asosiasi Alevi. Strategi internal yang dilakukan oleh kelompok kepentingan Alevi di Turki dinilai tidak berhasil dalam membentuk tindakan kolektif. Adapun strategi eksternal berupa aktivitas dilakukan oleh AABF selaku organisasi Alevi di Jerman seperti Alevilerim Sesi, mengadakan dialog antar agama, berpartisipasi dalam German Islam Conference. Strategi eksternal dinilai berhasil membentuk tindakan kolektif.*

### Abstract

*Alevi's post-dismished in Turkiye is can not be separated from the Ottoman's era. Turkish society still consider Alevi is an profane faith and contain heresy practical. This article discusses Alevi's strategy post-dismished by Turkish citizen in order to gain Alevi recognition. In this article, the author tries to examine the strategy adopted by Alevi as a interest group in Turkiye in gaining recognition. In answering these problems, the writer uses a qualitative descriptive method with the elaboration of the data that has been collected and compiled based on the systematic discussion. This study uses the concept of interest groups along with the parameters for the success of collective action. The findings of this article show that Alevi carried out two strategies, namely external and internal in order to gain recognition. Such as the DRSA, the opening of Alevi initiated by the AKP party, and Alevi Association. The internal strategy carried out by alevi interest groups in Turkey is considered unsuccessful in forming collective action. The external strategy is in the form of activities carried out by AABF as an Alevi organization in Germany such as making an Alevilerim Sesi, holding inter-religious dialogue, participating in the German Islam Conference. External strategies that are considered successful in forming collective action.*

## 1. Pendahuluan

Alevis merujuk pada komunitas religius asli Anatolia, kelompok ini mulai bermigrasi ke kota-kota besar di Turki pada 1950-an dan menjadi bagian dari komunitas pekerja pada 1960-an di Jerman (Gedik, Erdoğan, 2020). Komunitas religius ini menekankan kepercayaannya pada Imam Ali, sepupu dan menantu Nabi Muhammad, dan rantai dua belas Imam. Sementara Alevisme/Alevi/Aliviyah sering dikategorikan sebuah ajaran di bawah denominasi Islam Syiah. Di satu sisi, seperti halnya Muslim Syiah, Alevis menganggap keturunan Nabi Muhammad (12 Imam) sebagai suci dan melihat mereka sebagai pemimpin filosofis mereka. Kedudukan praktik Alevis masih diperdebatkan apakah masuk kategori kelompok budaya atau bagian dari Islam (US Government, 2011). Penasihat Menteri dan Koordinator Inisiatif Alevi mencatat dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam jurnal *Insight Turkey* bahwa sebagai sebuah kelompok Alevis tidak memiliki wacana terpadu dan ada ketidaksepakatan di antara mereka tentang apakah Alevisme adalah agama, sebuah budaya, suatu etnisitas, atau suatu struktur etno-religius (SUBAŞI, 2012). Sebuah artikel di jurnal akademik *Peace and Conflict* menunjukkan bahwa ada berbagai keyakinan dan praktik di antara mereka yang menyebut diri mereka Alevi. Alevisme adalah sekte Islam yang mengandung unsur Syi'ah dan Islam (Yildiz & Verkuyten, 2011). Laporan Kebebasan Beragama Internasional AS untuk tahun 2010 mencatat bahwa Alevisme mengandung unsur-unsur Islam Sunni dan Syiah. Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional mencatat bahwa pemerintah Turki menganggap Alevis sebagai Muslim heterodoks (US Government, 2011). Dua akademisi yang menulis dalam jurnal *South European Society and Politics* mencatat bahwa budaya dan gaya hidup Alevi lebih sekuler daripada kelompok Sunni dan ada kontras yang mencolok dalam hal teologi dan praktik keagamaan antara kedua kelompok (Çarkoğlu & Bilgili, 2011). Dalam sebuah artikel Studi Turki tentang Alevisme dan politik di Turki, para akademisi menunjukkan bahwa Alevis menganggap diri mereka non-Sunni (Sen & Soner, 2016).

Perkiraan ukuran populasi Alevi di Turki berkisar dari 15-20 juta menurut *freedom house* (Lambert, 2011). Para akademisi yang menulis di *Peace and Conflict* mencatat bahwa mayoritas Alevis tinggal di Anatolia (Yildiz & Verkuyten, 2011). Sebuah artikel di *Today's Zaman*, sebuah surat kabar berbahasa Inggris Turki mencatat bahwa Alevisme dipraktekkan di daerah lain mencakup: Elazığ, Nevşehir, Malatya, Maras, Sivas dan Yozgat. Sebuah laporan penelitian tahun 2009 oleh Universitas Bogazici dan *Open Society Foundation* di Turki mendaftarkan tempat-tempat berikut yang memiliki populasi Alevi yang besar: Erzurum, Kayseri, Malatya dan Sivas (Binnaz Toprak, İrfan Bozan, Tan Morgül, 2010). Pada dasarnya identitas Alevi, secara tradisional merupakan identitas kelompok komunal yang ditandai dengan adanya budaya yang jelas, nilai-nilai moral, ritual yang ada. Ritual dan praktik budaya Alevis telah memainkan peran penting dalam mempertahankan identitasnya. Isu Alevi merupakan masalah yang cukup rumit di Turki. Adanya konflik, kebencian, serta keluhan maupun ketakutan terus menerus yang terjadi mengenai Alevi sudah ada selama berabad-abad lamanya.

Sumber lain menyebutkan Alevisme berasal dari campuran kompleks Sufi Islam, Syiah ekstrim, dan Safawi di Anatolia (Altınordu, 2021). Beberapa tarekat Sufi seperti Safawi menerima ajaran Syiah yang menghormati Ali dan Dua Belas

Imam, kemudian pengikut dan simpatisan mereka yang disebut *Kızılbaş* yang berarti berambut merah (Editors of Encyclopaedia, 2020). *Kızılbaş* kemudian berkembang menjadi Alevi. Pada abad ke-16, di bawah bawah Sah Ismail I, Kizilbash menjadi dominan di Anatolia Timur, menaklukkan Azerbaijan, dan dari sana kemudian menaklukkan seluruh Iran. Mereka melakukan pemberontakan melawan Sunni di antara banyak kelompok Sufi, Syi'ah, dan *Kızılbaş*. Anatolia kemudian menjadi tempat peperangan yang berlarut-larut antara Ottoman Sunni dan Safawi Sufi-Syiah (Dressler, 2005). Kedua belah pihak mulai menekankan propaganda yang bertemakan perbedaan agama antara satu sama lain untuk melegitimasi agresi yang dilakukan. Di sisi Ottoman, hal ini mengarah pada Islam Sunni Turki ini sebagai skala untuk keyakinan yang benar yang dibangun secara langsung dan kontras dengan tradisi Syi'ah (Dressler, 2005).

Serangkaian pertempuran dimenangkan Ottoman di Anatolia, kemudian ada pembatasan antara keduanya diawasi ketat oleh Ottoman, dan suku *Kızılbaş* yang menetap di wilayah Ottoman dianiaya untuk menghindari pergolakan *Kızılbaş* lebih lanjut. Ottoman mencoba untuk menghilangkan ancaman pemberontakan lanjutan dengan perintah resmi untuk menganiaya *Kızılbaş* dan siapa pun yang bersimpati dengan mereka. Era ini menganggap *Kızılbaş* sebagai pelanggar hukum dan ketertiban yang dijabarkan oleh tulisan-tulisan polemik dengan menyebut mereka sesat dan tidak bermoral. Sumber sejarah menyebutkan Ottoman membangun gagasan bid'ah terkait *Kızılbaş* dalam dokumen yuridis pada perintah kekaisaran (ferman) dan tulisan polemik dari abad ke-16 (Imber, 1979). Di antara tindakan keras yang diambil terhadap *Kızılbaş* di dalam Kekaisaran Ottoman adalah seringnya dijatuhkan hukuman mati, pengusiran keluarga, hak asuh atau kerja berat di atas kapal (Dressler, 2005). Hal inilah yang mendorong Safawi kembali ke Iran (Allousche, 1988)

*Kızılbaş* Anatolia mendapati diri mereka terpisah secara militer, politik dan agama dari pusat mereka di Iran. Mereka lebih memilih pindah ke pedesaan yang terisolasi dan memutuskan untuk mengembangkan struktur dan doktrin komunitas mereka yang unik. Setelah penganiayaan berat dan pembantaian oleh Ottoman yang berlangsung hingga abad ke-18, Alevi menggunakan taktik *Taqiyya* (penyembunyian agama yang diizinkan oleh semua kelompok Syiah) untuk hidup di sekitar sunni. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyembunyikan iman mereka dan bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. *Kızılbaş* bercampur dengan kelompok Syiah-Sufi lainnya, Bektashi, yang dengannya mereka berbagi keyakinan dan praktik keagamaan, dan keduanya berbaur menjadi Alevi. Terisolasi dari Ottoman Sunni dan Safawi Syiah, Alevi mengembangkan tradisi, praktik, dan doktrin yang pada awal abad ke-17 menandai mereka sebagai komunitas agama yang tertutup dan otonom (Allousche, 1988).

Alevi memanifestasikan diri mereka dalam praktik ibadah yang lebih filosofis (Dressler, 2015). Alih-alih mempraktikkan aturan agama Islam Sunni yang ketat seperti shalat lima waktu setiap hari, haji dan puasa selama tiga puluh hari di bulan Ramadhan. Alevi tidak berpuasa selama Ramadhan, tetapi secara tradisional selama dua belas hari selama bulan Muharrem mereka berpuasa. Alevisme dicirikan oleh tidak adanya otoritas keagamaan yang tercentral di mana doktrin-doktrin agama ditransformasikan secara verbal dari satu generasi ke generasi lainnya (Dressler, 2008). Struktur terpenting dalam komunitas ini adalah *Ocak* yang diyakini sebagai keturunan Ali, Husein dan 12 Imam. Dalam sistem ini

terdapat tokoh-tokoh penting yang secara hierarkis diklasifikasikan sebagai *Rehber* (Pembimbing), *Pir* (Sepuh), *Dede* (Kakek) dan *Mursit* (Guru). Setiap desa Alevi terhubung dengan *Ocak* tetapi setiap desa tidak memiliki *Dede*, jika demikian *dede* bertanggung jawab untuk mengunjungi *Talipnya* setahun sekali (Dressler, 2015). *Ocak* bertanggung jawab untuk melakukan ritual, mengajarkan pengetahuan kepada generasi baru, menengahi dalam konflik hal ini mengartikan mereka adalah otoritas sentral untuk kelangsungan hidup pengetahuan dan identitas agama Alevi. *Dede* harus bertanggung jawab untuk melaksanakan *ayin-i cem* (doa yang diadakan di rumah pribadi atau bangunan komunal) (Martinovic & Verkuyten, 2016). Selain itu, upacara *Cem* (upacara Alevisme) juga diadakan secara tradisional baik fungsi keagamaan maupun sosial. Upacara *Cem* sebagian besar dilakukan dalam bahasa Turki sementara beberapa orang Kurdi Alevi melakukan *Cem* dalam bahasa Zazaki atau Kurmanci asli. Upacara *Cem* ini dilakukan di sebuah *Cemevi* (rumah cem) yang telah ditetapkan sebagai pola agama dan budaya oleh Alevi (Dressler, 2008). Namun silsilah istilah Alevisme yang muncul pada abad ke-19 dan berlanjut dengan hingga saat ini menunjukkan bahwa Alevisme telah dipermasalahkan secara politis oleh Turki di setiap periode terkait ideologi dan kepentingan tertentu (Kaya, 2016). Poin menarik mengenai bahasan ini adalah posisi dari problematisasi Alevisme dalam arti menyoroti upaya Islamisasi/Sunnifikasi Alevisme oleh Turki. Artinya Alevisme tidak didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang sah tetapi sebaliknya, sedangkan Islam Sunni didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang sah oleh negara. Dalam setiap periode, Alevisme dipandang sebagai ancaman oleh negara, sehingga dipermasalahkan dengan menentukan sistem kepercayaan mana yang normal (legitimate) dan mana yang abnormal (illegitimate). Dalam konteks ini, menariknya Alevisme dipermasalahkan sebagai sistem kepercayaan yang abnormal, sedangkan Sunni dianggap sebagai sistem kepercayaan yang normal.

Dinamika yang terjadi di masyarakat terhadap penolakan identitas alevi awalnya muncul tuduhan dan prasangka terhadap *Kızılbaş/Alevi* ketika laporan surat kabar diterbitkan. Di hampir setiap publikasi, dua pilar utama yang dihighlight adalah propaganda anti-*Kızılbaş* meliputi: penghinaan terhadap kewajiban Islam Sunni, keyakinan, praktik yang berbeda dan ketidaksucian *Kızılbaş*. Kebencian yang muncul terus menyebar dalam bentuk desas-desus dan lelucon yang dominan di ranah pribadi. Kira-kira sampai awal abad ke-20 sikap anti-*Kızılbaş/Alevi* merupakan bagian dari prasangka publik yang dianggap wajar untuk dijadikan cemoohan (ÇAMUROĞLU, 1998). Prasangka buruk lainnya terhadap Alevi semakin terlihat jelas ketika tahun 1970/80-an saat banyak pemuda Alevi berpartisipasi dalam Gerakan Kiri. Negara kemudian berupaya melawan mereka dengan menggunakan kebencian anti-Alevi sebagai instrumen. Berkenaan dengan situasi politik pada periode ini, Alevi dikaitkan dengan Komunisme dan Nasionalisme Kurdi, yang mengancam tatanan politik negara. Sekarang, sikap anti-Alevi dipengaruhi oleh situasi sejarah abad ke-16 ketika pergolakan *Kızılbaş* membawa kekacauan sosial dan politik. Keluarga Alevi kemudian dianggap meneruskan tradisi pemberontak ini, mereka dianggap memusuhi otoritas negara dan diperkirakan akan tetap seperti itu. Deskripsi pergolakan *Kızılbaş* tidak lebih dari tindakan pemberontakan terhadap otoritas negara hanyalah satu bagian dari situasi historis. Namun bagian ini dengan mudah berfungsi untuk memicu sikap anti-Alevi (ÇAMUROĞLU, 1998).



Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan strategi Alevi selaku kelompok kepentingan pasca penolakan masyarakat Turki melalui dua sisi yaitu internal dan external. Strategi internal melalui perantara organisasi DRSA, partai AKP, dan Alevi asosiasi. Strategi external melalui organisasi Alevi di Jerman. Dalam penelitian ini penulis memiliki fokus untuk mengetahui penolakan yang datang dari masyarakat Turki terhadap Alevi, serta mengetahui strategi secara internal yang dilakukan di Turki maupun di luar Turki yaitu di Jerman, penulis kemudian melakukan analisis sudah berhasil atau tidaknya strategi yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas memunculkan rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu **bagaimana strategi Alevi sebagai kelompok kepentingan pasca penolakan masyarakat Turki?**

## 2. Landasan Teori

Kelompok kepentingan dianggap sebagai actor dalam menyalurkan kepentingan sekelompok individu (Drs. Haryanto, 1982). Fungsi dari kelompok kepentingan ini digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan tuntutan kepentingan dari masyarakat terhadap sistem politik di suatu negara. Kelompok kepentingan berisi sekumpulan orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mencapai tujuannya. Sebagai kelompok yang memiliki tatanan organisasi dengan baik, mereka memiliki pola kepemimpinan, sumber finansial dalam membiayai kegiatan, serta adanya pola komunikasi yang berjalan baik ke dalam maupun keluar organisasi (Subakti, 2010). Kelompok kepentingan punya tujuan dalam memperjuangkan kepentingan suatu kaum serta mempengaruhi Lembaga politik agar keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingannya. Kelompok kepentingan ini tidak menempatkan representatifnya ke dalam dewan dewan penting seperti dewan perwakilan rakyat, melainkan hanya mempengaruhi satu partai di dalamnya (Budiharjo, 2008). Alasan munculnya adalah adanya rasa kesamaan kepentingan yang tujuannya mempengaruhi keputusan kebijakan di satu negara.

Dalam mengupas permasalahan yang terjadi pada kelompok kepentingan, muncul tindakan kolektif. Tindakan kolektif adalah akumulasi kepentingan bersama yang disusun oleh kelompok. Menurut Marcus Olson terdapat tiga determinasi atas keberhasilan tindakan kolektif: 1. Ukuran (size), 2. Homogenitas, 3. Tujuan kelompok (Budiharjo, 2008). Size yang dimaksud Olson adalah semakin besar ukuran suatu kelompok kepentingan maka semakin sulit untuk mengakomodir kepentingan kelompok tersebut, begitupun sebaliknya. Homogenitas diartikan sebagai semakin beragam kepentingan anggota kelompok maka akan sulit merumuskan kesepakatan bersama karena masing-masing pihak membawa kepentingannya sendiri. Tujuan kelompok diartikan semakin kabur tujuan yang dirumuskan serta disepakati akan semakin lemah tindakan kolektif yang dihasilkan.

## 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif berdasarkan yang telah dijelaskan di latar belakang. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif dimana penulis menggunakan data literatur sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan *library research*, metode ini dilakukan dengan cara mencari data yang relevan berdasarkan topik yang penulis kemukakan dalam penelitian ini melalui buku, jurnal penelitian, maupun report, dan juga website surat kabar resmi.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul, kemudian penulis menganalisa serta menarik kesimpulan berdasarkan 3 indikator atas keberhasilan tindakan kolektif menurut Marcus Olson dalam konsep kelompok kepentingan. Tiga indikator atas keberhasilan tindakan kolektif menjadi tolak ukur dari strategi yang dijalankan Alevi sebagai kelompok kepentingan dalam mendapatkan rekognisi secara internal dan eksternal berhasil atau tidak.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Penolakan Alevi di Turki

Sejak berdirinya Republik Turki tahun 1923, Alevi di Turki berjuang untuk mendapatkan pengakuan resmi dan kebebasan beragama, namun seruan tersebut belum didengar. Sejak awal 1990-an, para aktivis Alevi telah secara tegas membedakan antara Alevisme dan Islam Sunni, yang akhirnya mengarah pada kebangkitan Alevi yang ditandai dengan beredarnya publikasi oleh penulis Alevi tentang Alevi, dan pembentukan asosiasi berbasis komunitas di seluruh Turki dan di diaspora Eropa (ÇAMUROĞLU, 1998). Di berbagai bagian masyarakat Turki, yaitu di kalangan Sunnis, nasionalis Turki dan anti-Komunis, konten yang berhubungan dengan kebangkitan Alevi kemudian disalahgunakan untuk memobilisasi massa melawan Alevi. Propaganda anti-Alevi ini menghasilkan konflik terbuka yang melibatkan komunitas Alevi dengan masyarakat Turki seperti program anti-Alevi Maraş dan Orum pada tahun 1978, dan tidak melupakan insiden Sivas pada tahun 1993 (Sahin, 2001). Identitas Alevi didefinisikan berbeda dengan Muslim Sunni dan hal ini yang menimbulkan narasi tentang trauma kolektif yang terjadi di Hotel *Madimak* pada saat kerusuhan Sivas (Sokefeld, 2008). Rasa trauma yang ditimbulkan berfungsi sebagai batas simbolik yang menciptakan dan menopang rasa kebersamaan dan perasaan kesamaan di antara Alevi (Lazar & Litvak-Hirsch, 2009). Serangan Sivas di hotel *Madimak* melambangkan serangan terhadap aspek penting dan rentan dari kepercayaan Alevi. Pembantaian tersebut menggambarkan ancaman yang selalu ada terhadap keberadaan Alevi dan menunjukkan perlunya identitas Alevi yang kohesif yang melampaui perbedaan budaya, agama, dan politik internal.

Selain prasangka yang menghubungkan Alevi dengan sikap-sikap subversif seperti Sosialisme atau Komunisme dan Separatisme, adapula sikap yang menghina tentang ketidaksucian Alevi. Seperti juga fitnah dan rumor tentang perempuan bernama Söndürmek (ÇAMUROĞLU, 1998). Kali ini ditemukan dalam bentuk agitasi jahat atau lelucon di kalangan Sunni Turki. Salah satu contoh langka namun mencolok dari penggunaan konteks anti-Alevi sebagai dasar lelucon adalah insiden dalam acara televisi Turki pada tahun 1995. Dalam percakapan yang dirancang untuk menjadi lucu, pembawa acara Güner Mit bertanya pada seorang aktris yang berperan sebagai wanita hamil untuk mengungkapkan identitas ayah bayi. Setelah bertukar kata, wanita itu berkata ayah bayi itu adalah ayahnya juga. Setelah itu, mit menjawab dengan menanyakan apakah itu memang bayi ayahnya sendiri dan apakah dia seorang *Kızılbaş* ("*Bu ocuk babandan mı, sen Kızılbaş mısın?*"). Kejadian ini menunjukkan bahwa rumor tentang Söndürmek dan denominasi *Kızılbaş* masih dikenal oleh banyak orang Turki Sunni dianggap sebagai penghinaan yang cocok untuk dijadikan lelucon. Prasangka buruk lainnya yang masih tersebar luas mengenai ketidakmurnian Alevi seperti tidak adanya wudhu ritual Islam *gusl* dan *wudu'* dalam tradisi Alevi, dan tingkat kebersihan pribadi dipertanyakan.

*Minority Rights Group International* (MRG) tahun 2010 menunjukkan bahwa Alevi terus mengalami diskriminasi di sejumlah tingkatan. Laporan AS tentang kebebasan beragama juga menyatakan bahwa Alevi adalah salah satu agama minoritas yang menghadapi pelecehan dan diskriminasi sosial (Department of State, 2011). Menurut sebuah studi 2010 yang didukung oleh Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia tiga dari empat Alevi menunjukkan bahwa mereka telah menghadapi diskriminasi setidaknya dalam hal wilayah perumahan, di jalanan, dan dalam menemukan pekerjaan (Yildiz & Verkuyten, 2011).

Adanya diskriminasi yang terjadi terhadap Alevi dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi, politik. Dalam bidang sosial Peneliti Studi Turki mencatat bahwa Alevi terus mengalami pelecehan verbal secara tertulis maupun secara lisan. Alevi umumnya tidak diterima masyarakat Turki. Peneliti mencatat bahwa Muslim konservatif melihat Alevi sebagai kelompok yang tidak bersih, baik secara fisik maupun dalam perilaku moral mereka. Berdasarkan laporan penelitian 2009 yang diterbitkan oleh Bogazici University dan Open Society Foundation di Turki, ketika membahas diskriminasi terhadap Alevi di Anatolia, mencatat bahwa banyak yang menganggap Alevi tidak bersih (Binnaz Toprak, İrfan Bozan, Tan Morgül, 2010). Sunni menolak makanan yang ditawarkan kepada mereka oleh Alevi atau daging yang disembelih oleh seorang Alevi. Alevi juga dianggap oleh beberapa orang tidak dapat dipercaya dan banyak orang Alevi mengeluh bahwa mereka dianggap bertanggung jawab setiap kali terjadi insiden yang tidak menyenangkan atau mengganggu terjadi di kota mereka.

Dalam bidang budaya terdapat Laporan penelitian Universitas Bogazici yang menyebutkan pegawai negeri dan pejabat pemerintah melakukan kegiatan yang tidak mengenakan terhadap Alevi melalui kata-kata atau tindakan, seperti memberkati situs konstruksi Alevi dengan doa Sunni, atau mengabaikan permintaan untuk memperbaiki jalan di daerah Alev (Binnaz Toprak, İrfan Bozan, Tan Morgül, 2010). Laporan tersebut juga mencatat bahwa bahkan ketika Alevi mengadopsi kebiasaan Sunni untuk meningkatkan hubungan dengan komunitas Sunni, seperti puasa Ramadhan, mengenakan jilbab, atau pergi ke masjid, mereka masih menghadapi diskriminasi.

Dalam bidang ekonomi, pengangguran dan kesulitan mencari pekerjaan juga dilaporkan menjadi masalah bagi Alevi karena identitas mereka, baik di sektor publik maupun swasta. Laporan penelitian Universitas Bogazici menulis bahwa banyak yang tidak mengungkapkan identitas Alevi mereka di depan umum, tetapi beberapa nama dan tempat lahir dapat menunjukkan bahwa mereka adalah Alevi (Binnaz Toprak, İrfan Bozan, Tan Morgül, 2010).

Dalam bidang politik Direktorat urusan agama di Turki (*Diyanet İleri Başkanlığı* atau DRA) tidak mengakui Alevisme, yang mereka lakukan mencoba mengasimilasikan Alevi ke dalam Islam Sunni. DRA merupakan birokrasi negara yang memiliki anggaran cukup besar diantara banyak kementerian pemerintahan di Turki. Hal inilah yang mendefinisikan dalam mengatur praktik Islam publik yang sah dan bertanggung jawab. Seperti halnya terkait pendidikan Islam, pembangunan dan pemeliharaan masjid, pengeluaran fatwa, dan haji ke Mekkah. Otoritas keagamaan negara Turki melenggangkan bentuk kontrol agama yang didirikan sejak akhir kekaisaran Ottoman, yang mana pada saat itu Kristen dan Yahudi memiliki tingkat otonomi yang besar sementara Alevi tidak diakui. Tidak

seperti halnya komunitas muslim sunni dan non muslim minoritas pasca perjanjian lausanne tahun 1923 ditandatangani, Alevi tidak pernah menerima status resmi (Dressler, 2015).

Alevis yang sangat menjunjung tinggi loyalitas terhadap negara umumnya mendukung integrasi Alevisme ke dalam DRA. Sementara beberapa kelompok Alevis yang lebih kritis berpendapat untuk penghapusan DRA, mendesak negara untuk menarik diri dari organisasi urusan agama. Hal ini lebih mengarah ke bentuk sekularisme yang lebih liberal. Pernyataan yang dibuat pada tahun 1994 oleh presiden saat itu Mehmet Nuri Yılmaz masih mencerminkan posisi DRA dalam mempertanyakan status Alevi yaitu Alevisme bukanlah agama, juga bukan sekte Islam. Alevisme adalah budaya. Sementara DRA belum menunjukkan kecenderungan untuk mengakui Alevisme sebagai tradisi agama yang berbeda, baik di dalam atau di luar wilayah Islam.

#### 4.2 Strategi Internal Merespon Penolakan Alevi

Menghadapi penolakan di Turki, terdapat tiga strategi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan Alevi untuk memperkuat eksistensi mereka baik melalui pendirian DRSA sebagai bentuk pertentangan terhadap aktivitas monopoli DRA, *Alevi Opening* yang di prakarsai oleh partai AKP dan pertemuan reguler Asosiasi Alevi.

Pertama, berdirinya DRSA (*Directorate of Religious Services of Alevi Islam*) pada November 2003 dalam rangka Konvensi Ketiga Pemimpin Iman Anatolia merupakan sebuah prakarsa yang disponsori oleh *CEM Foundation*. DRSA selaku bagian dari Kelompok kepentingan diartikan sebagai sebuah kelompok yang terorganisir yang memiliki tujuan bersama dan berusaha mempengaruhi pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyesuaikan kepentingan kelompok (Kenneth Janda, Jeffry M Berry, 1997). Kelompok kepentingan menurut Almond dan Powell (1980) terbagi empat jenis, yaitu: kelompok anomik, kelompok asosional, kelompok non asosional, dan kelompok institusional. Kelompok institusional punya kelembagaan yang formal, adanya kegiatan yang rutin, disertai jaringan organisasi yang kuat mengacu pada operasi DRSA dibawah *CEM Foundation* (Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, 1966). Yayasan CEM (*Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi* atau yang disebut Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Republik) adalah asosiasi Alevi yang kantor pusatnya di Istanbul. Konvensi Pemimpin Iman Anatolia yang berkumpul setiap tahun dan DRSA sebagaimana merupakan bagian dari jaringan CEM yang dibuat untuk memperluas legitimasinya dan untuk memosisikannya sebagai pemain paling kuat dalam bidang politik Alevi. Dalam dokumen pendiriannya, DRSA menguraikan tujuannya dalam hal : 1. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kepercayaan, bentuk peribadatan, perkembangan sejarah, filsafat, prinsip-prinsip sosial dan etika, serta komunikasi dan budaya Islam Alevi. 2. Menjamin melalui pembinaan agama, keyakinan, dan pengamalan pencerahan masyarakat dan sesuai dengan tujuan penerapan dan pengawasannya di tempat-tempat ibadah. Iman Alevi Islam mewakili Alevi-Bektaşî-Mevlevî-Nusayrî serta kelompok kepercayaan lain yang didasarkan pada interpretasi Islam ini. 3. DRSA menantang monopoli DRA hal ini merupakan reaksi terhadap penolakan negara dalam mengakui Alevis (Dressler, 2008). DRSA melakukan beberapa pelayanan seperti memulai kegiatan pelatihan para Dedes, mengadakan upacara cem, mengirimkan para dedes keluar negeri untuk melakukan kajian bagi penganut



yang tinggal di eropa. Hal ini berdampak baik hanya sebatas pada dinamika kepemimpinan Alevi dimana langkah transfer ilmu dilakukan merupakan suatu wujud kepedulian Alevi terhadap keyakinannya. Disamping itu DRSA menjamin sebagai tempat yang aman bagi para pemimpin Alevi di bawah satu atap.

Kedua, adanya strategi melalui AKP. Artikel Studi Turki menunjukkan bahwa setelah berkuasa pada tahun 2007, AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi, atau Partai Keadilan dan Pembangunan) memprakarsai dialog dengan komunitas Alevi yang disebut *Alevi Opening* (Bayram & Şule, 2011). Penasihat Menteri mencatat bahwa pemerintah AKP menyelenggarakan serangkaian lokakarya antara pemerintah dan pemangku kepentingan Alevi sebagai bagian dari *Alevi Opening* (SUBAŞI, 2012). Menurut artikel Studi Turki, tujuan dari tujuh lokakarya yang diadakan antara Juni 2009 dan Januari 2010 adalah untuk menentukan parameter kebijakan untuk tuntutan Alevi (Bayram & Şule, 2011). Selama lokakarya berlangsung, isu-isu yang dibahas berupa: legalisasi cemevis, menghentikan wajib belajar agama, memulihkan properti Alevi yang disita oleh undang-undang pada tahun dan penghapusan kebijakan asimilasi (Hürriyet Daily News, 2012). The Hurriyet Daily News melaporkan pada Maret 2011 bahwa selama pertemuan dengan komisi parlemen yang merancang konstitusi Turki yang baru, perwakilan Alevi menuntut agar dokumen baru tersebut mencakup perlindungan bagi Alevi dari *hate crimes* dan memuat pengakuan identitas Alevi. Serta perwakilan Alevi juga menuntut pengesahan cemevis. Selama mandat AKP pertama berlangsung, antara tahun 2002 dan 2007, partai yang berkuasa tidak melakukan inisiatif yang signifikan mengenai masalah Alevi, tidak mencoba apa-apa selain penambahan beberapa halaman tentang Alevisme dalam kurikulum sekolah untuk kelas agama di bawah rubrik interpretasi mistik Islam (Köse, 2010).

Pada tahun 2007 untuk pertama kalinya dua perwakilan Alevi yaitu Reha Amuroğlu dan Ibrahim Yiğit terpilih sebagai wakil dari AKP. Hal ini merupakan angin segar bagi harapan Alevi untuk dapat maju di partai politik dan membendung kepentingannya. Pada tahun 2008, pemerintah mulai menyelenggarakan makan malam Alevi selama periode puasa Alevi, mempertemukan Perdana Menteri dengan perwakilan asosiasi Alevi. Dan pada makan malam pertama, Erdogan mengatakan bahwa Republik Turki harus menjaga jarak yang sama dari setiap agama dan kepercayaan dan kelompok agama dan harus memastikan kebebasan setiap orang (Hürriyet Daily News, 2012). Hal ini merupakan sebuah momentum Perdana Menteri dan tokoh utama di AKP bergerak menuju perspektif sosial-politik tentang keragaman dan pengakuan yang setara bagi minoritas. Hal ini berdampak baik pada Alevi karena partai yang berkuasa dapat menyelenggarakan tujuh lokakarya antara Juni 2009 dan Januari 2010 untuk membahas isu-isu yang relevan di bawah delapan judul: Alevisme, masalah identitas, hambatan hukum dan konstitusional, status *Diyanet*, masalah pelajaran agama wajib, masa depan Hotel Madmak, dan status hukum *cemevi* dan pemuka agama *dede*. Namun, lokakarya Alevi ini juga dianggap gagal. Dampaknya berupa ketidakberhasilandalam menghasilkan hasil yang signifikan. Ada berbagai alasan untuk hal ini. Pertama, mereka melibatkan sebagian besar peserta Sunni (teolog, akademisi, penulis), hal ini diluar ekspektasi karena sebelumnya acara ini diharapkan melibatkan sebagian besar perwakilan Alevi jika tujuan pemerintah adalah mendengarkan masalah komunitas Alevi (Borovali & Boyraz, 2015). Selain itu, agenda debat lokakarya ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh peserta dan

asosiasi Alevi. Selanjutnya, asosiasi diaspora Alevi tidak diundang, hal ini merupakan pertanda yang menunjukkan bahwa AKP ingin mendekati masalah ini sebagai urusan internal (Borovali & Boyraz, 2015). Apalagi AKP tidak membingkai kebijakan *Alevi Opening* melalui platform publik seperti yang telah dilakukan untuk *Kurdish Opening* (Bardakçi, 2015). Erdogan tidak mengulangi wacana rekonsiliasi yang dia ucapkan pada makan malam Alevi pertama. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan masalah Alevi, pendekatan keagamaan yang diwakili oleh ungkapan Alevisme dalam hal cinta kepada nabi Ali bertekad untuk mewakili pendekatan politik terhadap masalah Erdogan, dan akibatnya AKP yang berkuasa secara keseluruhan yang semakin di bawah kendalinya.

Ketiga, Asosiasi Alevi. Pada tanggal 9 november 2008 asosiasi Alevi mengadakan pertemuan yang bertema "hak kewarganegaraan yang sama di bawah supremasi hukum" (Köse, 2010). Banyak asosiasi Alevi pada pertemuan itu merumuskan perjuangan mereka sebagai perjuangan untuk demokratisasi yang lebih luas. Namun, wacana demokrasi, sekularisme, dan hak asasi manusia bukanlah satu-satunya kerangka kerja yang tersedia untuk merumuskan klaim berbasis identitas Alevi. Beberapa asosiasi telah merumuskannya sebagai hak beragama. Faktanya, ada berbagai variasi sehubungan dengan klaim berbasis identitas dari berbagai asosiasi dan yayasan Alevi, yang dengan sendirinya merupakan sumber ketegangan dan perjuangan intra-komunal. Misalnya, Federasi Alevi Bektaşî (ABF) menentang keberadaan Diyanet, berbagai kursus agama, dan gaji untuk Alevi dedes, sedangkan Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı (CEM) atau Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Republik dan Yayasan Ehl-i Beyt menginginkan direktorat khusus untuk Alevi, mirip dengan Diyanet, atau perwakilan Alevi dalam Diyanet. ABF ingin negara Turki menahan diri dari kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan agama, sebagai persyaratan sekularisme/laicite. CEM dan Yayasan Ehl-i Beyt menuntut pemerataan pelayanan publik kepada semua warga negara tanpa memandang suku, sekte, agama, pangkat, dan usia. Mereka pun sepakat dengan rencana pembayaran gaji kepada Alevi dedes. Ada konsensus tentang meninggalkan praktik diskriminatif terhadap warga Alevi dan representasi yang sama dari budaya dan gaya hidup Alevi di forum media publik.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat terlihat bahwa kelompok kepentingan Alevi melakukan serangkaian strategi internal di Turki berdasarkan tiga aktivitas utama, sebetulnya Alevi memiliki tatanan organisasi yang baik seperti yang kita lihat seperti berdirinya DRSA yang bekerja dibawah naungan CEM Foundation apabila mengacu pada kategori kelompok kepentingan institusional yang ditandai oleh punya kelembagaan formal dan memiliki kegiatan rutin. Berdirinya DRSA tentunya bukan tanpa alasan melainkan sebagai tempat mengakomodir kepentingan Alevi untuk mendapatkan rekognisi. Strategi berikutnya yang dilakukan oleh kelompok kepentingan Alevi melalui AKP yang merupakan kelompok kepentingan informal karena perwakilan Alevi masuk ke dalam partai untuk melancarkan kepentingan Alevi. Oleh karena itu penulis berfokus menggunakan konsep tindakan kolektif sebagai cara mengupas permasalahan yang terjadi di kelompok kepentingan. Dalam konsep ini Marcus Olson menetapkan tiga indicator atau parameter utama agar dapat dikatakan tindakan kolektif yang dilakukan Alevi selaku kelompok kepentingan secara

internal berhasil atau tidak. Tiga indikator tersebut yang ditetapkan oleh Olson berdasarkan: size, hegemonitas, dan ukuran.

Size dikatakan sebagai indikator dimana sebuah kelompok kepentingan semakin besar jumlahnya maka sulit untuk mengakomodir kepentingan tersebut. Dari tiga strategi internal alevi dihighlight bahwa ada tiganya kelompok kepentingan yang pada akhirnya tidak merepresentasikan keberhasilan dalam mengakomodir kepentingan Alevi ini. Saking banyaknya kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan yang berbeda, lantas mengakibatkan kepentingan utamanya terabaikan karena yang digagas saling berbenturan dan tidak terakomodir.

Hegemonitas berarti semakin tidak homogen maka kepentingan bersama tidak terakomodir dengan baik, maka akan sulit merumuskan kepentingan dengan baik. Pada saat *Alevi Opening*, kelompok kepentingan yang ada didalamnya yang terlibat justru banyakan dari kalangan sunni (Borovali & Boyraz, 2015). Hal ini mencerminkan ketidakadanya homogenitas yang terjadi maka kepentingan alevi sangat tidak terakomodir pada saat itu. Agenda ini sebagaimana diatur oleh pemerintah, melainkan bukan dari sekumpulan representatif Alevi menyebabkan tujuannya yang gagal tercapai

Tujuan kelompok, hal ini tercermin di Asosiasi Alevi. Dalam asosiasi ini banyak sekali yang menjadi permintaan atau tuntutan alevi yang datang dari komunitas representative alevi lainnya. Hal ini menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan yang menjadi tonggak utama yang alevi ingin capai, dikarenakan banyaknya permintaan yang membuat kepentingan bersama tidak jalan. Oleh karena itu perlunya organisasi Alevi yang tercentral dalam menjalankan dan membendung kepentingannya untuk mengedepankan yang menjadi kepentingan bersama (AKYÜZ, 2015).

Dari ketiga indikator diatas sebagai parameter keberhasilan tindakan kolektif, kelompok kepentingan Alevi dalam level domestik dikatakan gagal dalam memunculkan tindakan kolektif. Karena disamping terlalu kabur, dan banyaknya pihak yang berkepentingan yang tetap teguh atas kepentingannya seperti Federasi Alevi Bektaşî (ABF) yang fokusnya menentang keberadaan Diyanet, berbagai kursus agama, dan gaji untuk Alevi dedes, sedangkan Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı (CEM) dan Yayasan Ehl-i Beyt meminta direktorat khusus untuk Alevi, mirip dengan Diyanet, atau perwakilan Alevi dalam Diyanet. ABF ingin negara Turki menahan diri dari kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan agama, sebagai persyaratan sekularisme/laicite. CEM dan Yayasan Ehl-i Beyt menuntut pemerataan pelayanan publik kepada semua warga negara tanpa memandang suku, sekte, agama, pangkat, dan usia. Banyaknya kepentingan inilah yang mengakibatkan susahny terakomodir kepentingan utama Alevi.

### 4.3 Strategi Eksternal Merespon Penolakan Alevi

Pertama, Pembentukan *Alevilerim Sesi (voice of alevi)*. *Voice of Alevi* merupakan inisiasi yang dibentuk AABF dalam membendung kepentingan dalam mendapatkan pengakuan di Turki. *Alevilerim Sesi* dibentuk atas dasar kritik kebijakan Turki terhadap Alevi. *Alavilerin Sesi* memulai penerbitan pertamanya sejak february 1994 dalam Bahasa Turki, dan selang beberapa tahun kemudian pada tahun 2001 penerbitan dilakukan dalam Bahasa Turki dan Bahasa Jerman (Sokefeld, 2008). Portal ini berisi dukungan wacana tentang Alevisme, berita-

berita terkait komunitas Alevi, gagasan yang diperdebatkan berdasarkan pengalaman yang menerpa Alevi. Portal pemberitaan ini diyakini dapat memantik beberapa ide-ide yang mengkritik serta gagasan-gagasan yang kemudian dapat mengambil perhatian publik terhadap Alevi.

Kedua, dialog antar umat beragama (*interfaith dialogue*). AABF sebagai kelompok kepentingan Alevi di Jerman menghadiri berbagai inisiatif yang dikerjakan oleh Gereja Katolik di Jerman sebagai bentuk dialog antar agama yang tujuannya memerangi radikalisme Islam. Gereja Katolik mengizinkan AABF dalam meletakkan Ashura (Ashura merupakan hidangan spesial yang disajikan saat periode puasa muharram berakhir) untuk jemaat gereja ataupun siapa saja yang berlalu lalang di depan Katedral Cologne yang terletak di pusat kota. Selanjutnya keikutsertaan AABF dalam menghadiri simposium *Interfaith Dialogue in Europe* yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Universitas Cologne. Selain itu pusat budaya Alevi sering berpartisipasi mengadakan dialog terbuka antar agama bersama dengan Komunitas Yahudi, Ortodoks, Kristen Protestan, maupun Budha (Peucker & Akbarzadeh, 2014). Dalam semua kegiatan dialog yang melibatkan komunitas keagamaan ini pendekatan damai Alevisme ditekankan.

Ketiga, keikutsertaan AABF di German Islam Conference. Konferensi Islam Jerman dibentuk pada bulan September 2006 di bawah kepemimpinan mantan Menteri Federal Dalam Negeri Wolfgang Schäuble. GIC didirikan beberapa bulan setelah peluncuran KTT Integrasi Nasional pertama (Integrationsgipfel der Bundesregierung), Konferensi Islam Jerman berusaha untuk melembagakan dialog antara negara Jerman, Sunni, dan Alevi di tingkat nasional. Pada Konferensi Islam Jerman, komunitas Muslim Turki diwakili oleh DİTİB, Persatuan Pusat Kebudayaan Islam, Komunitas Turki sekuler di Jerman (*Türkische Gemeinde di Deutschland/TGD*), dan AABF serta oleh aktor individu kunci dan lainnya organisasi Muslim (Sonja Haug, Stephanie Mussig, 2009). Perwakilan Alevi dari Asosiasi Budaya bernama Pir Sultan Abdal di Ankara juga memuji pendekatan positif dan inklusif Konferensi Islam Jerman terhadap Alevi. Konferensi telah mendorong partisipasi politik Alevi yang lebih dalam di Jerman dengan berkontribusi pada pengembangan rasa saling percaya dan pemulihan hubungan antara komunitas Alevi dan elit politik Jerman. Partisipasi Alevi dalam Konferensi Islam Jerman telah mengkonsolidasikan citra mereka sebagai lawan bicara yang sah dengan pemerintah yang bertentangan dengan Muslim Sunni. Munculnya ekstremisme agama Sunni di Eropa dan studi terbaru menunjukkan bahwa Alevi cenderung tidak memiliki sikap fundamentalis dibandingkan dengan Muslim Sunni (Koopmans, 2014). Perkembangan terbaru lainnya yang berkontribusi pada perkembangan interaksi positif antara negara bagian Jerman dan Alevi adalah pengakuan AABF sebagai komunitas keagamaan (*Religionsgemeinschaft*) di berbagai Länder (negara bagian Jerman), termasuk North-Rhine Westphalia, Hesse, Berlin, Bavaria, dan Hamburg mengikuti pembentukan Konferensi Islam Jerman. Pengakuan status komunitas agama memberi Alevi hak untuk memberikan pendidikan agama Alevi di negara bagian ini. Selain itu, perpanjangan status komunitas agama dalam bentuk kontrak negara (*Staatsvertrag*) yang dibuat antara pembuat kebijakan Jerman dan perwakilan Alevi memungkinkan pengakuan cemevis sebagai tempat ibadah dan komunitas Alevi. Perubahan tersebut memungkinkan komunitas Alevi untuk mengendalikan pendidikan



agamanya sendiri, dimulainya kursi akademik mengenai Alevism di Universitas Hamburg pada Januari 2015 menandai peristiwa penting lain untuk perluasan hak Alevi di Jerman.

Berdasarkan pemaparan strategi eksternal yang telah dijelaskan, dapat dilihat disamping kelompok kepentingan Alevi melakukan strategi domestik untuk mendapatkan pengakuan di Turki, mereka juga melakukan serangkaian strategi eksternal. Manuver yang dilakukan Alevi di luar Turki tentunya sedikit berbeda. Alevi di luar Turki lebih mengedepankan pengenalan Alevi di mata orang Jerman sebagai pemahaman kepercayaan untuk mendapatkan rekognisi dan yang terpenting tidak terpengaruh oleh ideologi. Berdasarkan tiga parameter keberhasilan terbentuknya identitas kolektif menurut Olson dilihat dari pola yang dilakukan Alevi sebagai kelompok kepentingan di luar Turki (Jerman), berikut pemaparannya:

Dari segi size, kelompok kepentingan Alevi di Jerman bentuknya tercentral dan tetap teguh terhadap tujuan menyebarkan pemahaman terkait Alevi yang tidak memasukan kepentingan ideologi. Alevi memprioritaskan kepentingannya untuk diartikulasikan ataupun dijalankan agar dapat mendapatkan rekognisi. AABF menganggap identitas Alevi lebih penting. AABF merupakan organisasi alevi yang terkuat diantara yang terdapat di negara lainnya. Melalui Alevilirim Sesi diartikulasikan sebagai wadah untuk mencetuskan beberapa ide-ide yang mengkritik serta menghasilkan pemikiran yang kemudian dapat mengambil perhatian publik terhadap Alevi.

Berdasarkan sisi homogenitas, dikatakan bahwa apabila yang terlibat semakin homogen maka kepentingan bersama akan terakomodir dengan baik. AABF berisikan orang-orang yang tidak mengedepankan ideologis. Maka dari itu adanya ketidakterlibatan Kurdi Alevi, individu Alevi sayap kiri, dan ultranasionalis Turki Alevi di AABF karena filosofi AABF mengedepankan pada keyakinan Alevi dipandang lebih baik daripada mendukung bercampurnya ideologi mereka yang memicu terpecah belahnya kepentingan Alevi (Yaman & Dönmez, 2016).

Dari sisi tujuan kelompok, sebagaimana AABF selaku pioneer organisasi Alevi di Jerman, tujuan kelompok Alevi di Jerman terutama AABF mendapatkan rekognisi melalui pendekatan damai, dan filosofi dari AABF itu sendiri Alevi merupakan sebuah kepercayaan. Kelompok ini menjalankan kepentingannya dengan cara mengedepankan pendekatan damai dan terbuka. Keterlibatan AABF di *interfaith dialogue* serta konferensi Islam Jerman disinyalir merupakan contoh baik dari implementasi pendekatan damai yang sudah disinggung sebelumnya. Keterlibatan ini dianggap dapat memicu dalam partisipasi politik di Jerman, yang mana *long term effect* yang dihasilkan seperti Alevi memiliki hak untuk memberikan pendidikan agama seperti dimulainya mata kuliah Alevism di Universitas Hamburg tahun 2015 (Koopmans, 2014).

Ketiga indikator atas keberhasilannya tindakan kolektif, kelompok kepentingan Alevi di Jerman melalui AABF dikatakan berhasil dalam membentuk tindakan kolektif yang mana tujuan utamanya adalah mendapatkan pengakuan. Kunci dari keberhasilan ini yang paling mendasar adalah tidak ada campur tangan ideologi yang masuk dalam proses untuk mendapatkan rekognisi ini. Oleh karena itu tujuan yang dibentuk tetap terarah.

Strategi kelompok kepentingan Alevi di Jerman sayangnya tidak memiliki keterkaitan dengan Alevi yang di Turki. Alasannya karena lokasi organisasi, ruang di mana mereka aktif, dan tujuan yang mereka coba capai tentunya berbeda. Misalnya, ketika organisasi Alevi di Jerman melobi Komisi Eropa, mereka tetap menekankan pada masalah Alevi di Turki. Tetapi organisasi yang sama juga bekerja di negara-negara pemukiman Eropa untuk para migran Alevi (Massicard, 2011).

## 5. Kesimpulan

Merujuk pada penolakan yang terjadi terhadap Alevi, kelompok kepentingan Alevi melakukan serangkaian strategi baik secara internal dan eksternal. Secara internal melalui DRSA, Alevi Opening partai AKP, dan asosiasi Alevi. Kelompok kepentingan Alevi di Turki dinilai tidak berhasil dalam membendung kepentingan Alevi mengacu pada tidak terpenuhinya tiga indikator tindakan kolektif Olson. Strategi ini dinilai tidak berhasil mengacu pada banyaknya kelompok kepentingan yang terlibat hal ini menyebabkan tidak terpusatnya kepentingan Alevi dan bercampurnya kepentingan untuk saling dapat berpengaruh sehingga meluluhlantakan apa yang menjadi kepentingan utamanya yaitu mendapatkan pengakuan. Sedangkan strategi yang dilakukan secara eksternal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya strategi ini dijalankan oleh organisasi *pioneer* Alevi di Jerman yaitu AABF dinilai berhasil membentuk tindakan kolektif. Strategi kelompok kepentingan Alevi di Jerman sehingga dikatakan berhasil adalah berani berpegang teguh pada ketidakterlibatan ideologi, sehingga dalam membentuk tindakan kolektif lebih mudah karena diisi oleh orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan tidak terpengaruh oleh kepentingan masing-masing. Kemudian kedudukan organisasi ini yang tercentral dan mengambil filosofi sebuah komunitas kepercayaan yang damai yang mana hal ini tercermin dari keterlibatannya dalam *interfaith dialogue* maupun saat konferensi Islam Jerman. Keunikan dari strategi kelompok kepentingan ini dari sisi internal mereka bisa menjangkau hingga menjadi representatif di sebuah partai, dan sisi eksternal Alevi juga bisa memperluas kepentingannya di Jerman, seperti yang diketahui tidak semua *interest group* yang *islamic centrist* berhasil melebarkan pengaruhnya di Jerman bahkan di negara Uni Eropa. Walaupun tidak adanya korelasi langsung yang dirasakan oleh Alevi di Turki namun strategi eksternal kelompok kepentingan Alevi melalui organisasi Alevi di Jerman sudah dirasa cukup dalam hal membendung kepentingan Alevi di luar Turki, Alevi di Jerman tetap memproyeksikan permasalahan Alevi di Turki berdasarkan cara yang dilakukan dengan tetap berhubungan baik dengan pihak Uni Eropa dan menjadikannya agenda utama.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada instansi penulis yaitu Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian dalam proses penulisan artikel ini. Serta tidak lupa penulis ucapkan kepada editor Jurnal Sang Pencerah Universitas Muhammadiyah Buton yang telah menisisipkan waktu, upaya, serta dukungan dalam publikasi artikel ini. Terakhir penulis berterima kasih pada pihak yang terlibat dalam penulisan ini yang telah memberi arahan, saran, maupun bimbingan dalam kelancaran penulisan artikel ini.

## Daftar Pustaka

- AKYÜZ, E. (2015). The Solutions To The Alevi Issues In The Context Of Democracy, Laicism And Equal Citizenship. *Journal of International Social Research*, 8(40), 440–440. <https://doi.org/10.17719/jisr.20154013916>
- Allousche, A. (1988). The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906-962/1500-1555). In Klaus Schwarz. <https://doi.org/10.2307/1570769>
- Altınordu, A. (2021). Religion and Politics in Contemporary Turkey. *The Oxford Handbook of the Sociology of the Middle East*, June. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190087470.013.49>
- Bardakçi, M. (2015). The Alevi Opening of the AKP Government in Turkey: Walking a Tightrope between Democracy and Identity. *Turkish Studies*, 16(3), 349–370. <https://doi.org/10.1080/14683849.2015.1050959>
- Bayram, A. S., & Şule, T. (2011). Alevis and Alevism in the changing context of Turkish politics: The justice and development party's alevi opening. *Turkish Studies*, 12(3), 419–434. <https://doi.org/10.1080/14683849.2011.604214>
- Binnaz Toprak, İrfan Bozan, Tan Morgül, N. Ş. (2010). *Being Different in Turkey: Religion, Conservatism and Otherization*.
- Borovali, M., & Boyraz, C. (2015). The Alevi Workshops: An Opening Without an Outcome? *Turkish Studies*, 16(2), 145–160. <https://doi.org/10.1080/14683849.2015.1043279>
- Budiharjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- ÇAMUROĞLU, R. (1998). Alevi Identity. In E. Ö. and C. R. Tord Olsson (Ed.), *Swedish Research Institute in Istanbul* (Vol. 1999, Issue December, pp. 93–100). Taylor & Francis.
- Çarkoğlu, A., & Bilgili, N. Ç. (2011). A precarious relationship: The Alevi minority, the Turkish state and the EU. *South European Society and Politics*, 16(2), 351–364. <https://doi.org/10.1080/13608746.2011.577956>
- Department of State. (2011). *International Religious Freedom Report for July-December 2010*.
- Dressler, M. (2005). Inventing Orthodoxy: Competing Claims for Authority and Legitimacy in the Ottoman-Safavid Conflict. In *Legitimizing the Order: The Ottoman Rhetoric of State Power*. Brill.
- Dressler, M. (2008). Religio-secular metamorphoses: The re-making of Turkish Alevism. *Journal of the American Academy of Religion*, 76(2), 280–311. <https://doi.org/10.1093/jaarel/lfn033>
- Dressler, M. (2015). Turkish politics of doxa: Otherizing the alevis as heterodox. *Philosophy and Social Criticism*, 41(4–5), 445–451. <https://doi.org/10.1177/0191453714567492>
- Drs. Haryanto. (1982). *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Editors of Encyclopaedia. (2020). *Kizilbash*. Britanica.
- Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell. (1966). *Comparative Politics:*

- Development approach* (Vol. 63, Issue 2). Little, Brown and Company.
- Gedik, Erdoğan, H. B.-G. (2020). Alevism in Turkey and in Transnational Space: Negotiated Identities between Religion, Culture and Law. *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. <https://doi.org/10.13130/1971-8543/14392>
- Hürriyet Daily News. (2012, May). CHP deputy demands cemevi in Parliament. *Hürriyet Daily News*.
- Imber, C. H. (1979). The persecution of the Ottoman Shi'ites according to the mühimme defterleri, 1565—1585. In *Der Islam: Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients* (Vol. 56, Issue 2, pp. 245–273). <https://doi.org/10.1515/islam.1979.56.2.245>
- Kaya, A. (2016). The Alevi-Bektashi order in Turkey: syncretism transcending national borders. *Journal of Southeast European and Black Sea*, 16(2), 275–294. <https://doi.org/10.1080/14683857.2015.1120465>
- Kenneth Janda, Jeffry M Berry, J. G. (1997). The Challenge of Democracy. In *International Affairs* (Vol. 29, Issue 4). <https://doi.org/10.2307/2606018>
- Koopmans, R. (2014). *Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe* (No. 101; SP VI, Issue March).
- Köse, T. (2010). The AKP and the “alevi opening”: Understanding the dynamics of the rapprochement. *Insight Turkey*, 12(2), 143–164.
- Lambert, P. (2011). *Countries at the Crossroads 2011*.
- Lazar, A., & Litvak-Hirsch, T. (2009). Cultural trauma as a potential symbolic boundary. *International Journal of Politics, Culture and Society*, 22(2), 183–190. <https://doi.org/10.1007/s10767-009-9060-1>
- Martinovic, B., & Verkuyten, M. (2016). Inter-religious feelings of Sunni and Alevi Muslim minorities: The role of religious commitment and host national identification. *International Journal of Intercultural Relations*, 52, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2016.02.005>
- Massicard, E. (2011). Alevi Communities In Western Europe: Identity And Religious Strategies. In *Yearbook of Muslims in Europe Volume 2* (Issue March). <https://doi.org/10.1163/ej.9789004184756.i-712.789>
- Peucker, M., & Akbarzadeh, S. (2014). Muslim active citizenship in the west. In *Muslim Active Citizenship in the West*. <https://doi.org/10.4324/9781315870960>
- Reicher, S., Hopkins, N., Levine, M., & Rath, R. (2005). Entrepreneurs of hate and entrepreneurs of solidarity: Social identity as a basis for mass communication. *International Review of the Red Cross*, 87(860), 621–637. <https://doi.org/10.1017/S1816383100184462>
- Sahin, S. (2001). *The Alevi movement: Transformation from secret oral to public written culture in national and transnational social spaces*. New School for Social Research.
- Sen, S., & Soner, B. A. (2016). Understanding urban Alevism through its socio-spatial manifestations: Cemevis in İzmir. *Middle Eastern Studies*, 52(4), 694–710. <https://doi.org/10.1080/00263206.2016.1176919>



- Sokefeld, M. (2008). *Struggling for Recognition: : The Alevi Movement in Germany and in Transnational Space*. Berghagn Books.
- Sonja Haug, Stephanie Mussig, A. S. (2009). *Muslimisches Leben in Deutschland, im Auftrag der deutschen Islamkonferenz*.
- Subakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- SUBAŞI, N. (2012). The Alevi Opening: Concept, Strategy and Process. *Insight Turkey*, 12(2), 21–40. <https://doi.org/10.4135/9781452220376.n2>
- US Government. (n.d.). *International Religious Freedom Report for 2011*. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.
- Yaman, A., & Dönmez, R. Ö. (2016). Creating cohesion from diversity through mobilization: Locating the place of Alevi federations in Alevi collective identity in Europe. *Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi*, 77, 13–35. <https://doi.org/10.12973/hbvd.77.181>
- Yildiz, A. A., & Verkuyten, M. (2011). Inclusive victimhood: Social identity and the politicization of collective trauma among turkey's alevi in Western Europe. *Peace and Conflict*, 17(3), 243–269. <https://doi.org/10.1080/10781919.2011.587175>